**LAPORAN**

**PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**TAHUN 2017**

**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**KABUPATEN KUDUS**

1. **Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi**

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan landasan hukum yang berkaitan dengan; (1) Hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) Kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan sederhana; (3) Pengecualian bersifat ketat dan terbatas; dan (4) Kewajiban badan publik membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Mekanisme pelayanan dan pelaksanaan prinsip keterbukaan akan tercipta pemerintahan yang baik dengan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan publik dengan sebaik-baiknya, guna terciptanya *good governance* (pemerintahan yang baik).

Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dituntut untuk memberikan informasi publik, juga wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien. Sehingga informasi dapat diakses dengan mudah dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi dengan mudah, cermat, cepat dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Dasar Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Kudus :

1. Peraturan Bupati Kudus Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kudus ;
2. Keputusan Bupati Nomor 488/116.1/2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus

Guna memberikan layanan yang baik dan beriorientasi pada kepuasan pemohon informasi, PPID menyediakan ruangan desk informasi. Setiap layanan publik harus memiliki standar layanan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik, maka PPID Pemerintah Kabupaten Kudus telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP).

Standar Operasional Prosedur yang sudah disusun yaitu :

1. SOP Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik Nomor : 11/PPID/10.02/2017 tanggal 30 Mei 2017 ;
2. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik Nomor : 12/PPID/10.02/2017 tanggal 30 Mei 2017 ;
3. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik Nomor : 13/PPID/10.02/2017 tanggal 30 Mei 2017 ;
4. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik Nomor : 14/PPID/10.02/2017 tanggal 30 Mei 2017 ;
5. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi Publik Nomor : 15/PPID/10.02/2017 tanggal 30 Mei 2017 ;

1. **Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi**

Tugas PPID yaitu mengkoordinasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu, menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik, melakukan verifikasi bahan informasi publik, melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecuaikan, melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi, menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

Dalam tahun 2017, hal yang mendasar yang dilakukan adalah meng-*update* Daftar Informasi Publik. mengumpulkan informasi-informasi yang terbaru dari Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dengan tujuan untuk membantu publik dalam mengakses informasi yang ada Pemerintah Kabupaten Kudus.

Untuk mempermudah layanan informasi kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kudus juga memberikan saluran informasi melalui sarana sebagai berikut:

1. Website Kabupaten Kudus (kuduskab.go.id)
2. Media sosial ( twitter, facebook, instagram)
3. Pelayanan informasi publik melalui PPID
4. Pengaduan melalui aplikasi “Menara” (Menjaga Amanah Rakyat)

1. **Rincian Pelayanan Informasi Publik**

PPID Pemerintah Kabupaten Kudus selama tahun 2017 menerima permohonan informasi dari pemohon sebanyak 16 (enam belas) pemohon informasi dan seluruh permohonan yang masuk ke saluran permohonan informasi dikabulkan seluruhnya. Waktu rata-rata yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi adalah 14 (empat belas) hari.

RINCIAN PELLAYANAN INFORMASI

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BULAN | PEMOHON | WAKTU RATA-RATA PELAYANAN | JUMLAH PERMOHONAN YANG DIKABULKAN | | JUMLAH PERMOHONAN DITOLAK | ALASAN PERMOHANAN DITOLAK | |
| SEPENUHNYA | SEBAGIAN | DIKECUALIKAN | TIDAK DIKUASAI |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Januari | - | - | - | - | - | - | - |
| Pebruari | 1 | 14 hari | 1 | - | - | - | - |
| Maret | - | - | - | - | - | - | - |
| April | - | - | - | - | - | - | - |
| Mei | - | - | - | - | - | - | - |
| Juni | - | - | - | - | - | - | - |
| Juli | 6 | 14 hari | 6 | - | - | - | - |
| Agust | 3 | 14 hari | 3 | - | - | - | - |
| Sept | 1 | 14 hari | 1 | - | - | - | - |
| Oktber | 2 | 14 hari | 2 | - | - | - | - |
| Nopemb | 2 | 14 hari | 2 | - | - | - | - |
| Desemb | - | - | - | - | - | - | - |

Mekanisme permohonan informasi paling banyak para pemohon datang langsung ke Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus selaku PPID Utama di Jalan Sunan Muria Nomor 9 Kudus. Berbagai latar belakang ke desk informasi diantaranya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mahasiswa dan masyarakat umum. Jenis informasi yang diminta Pemohon informasi sebagian besar berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Tujuan dari penggunaan informasi adalah sebagian besar untuk pengawasan kinerja badan publik.

1. **Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi**

Selama tahun 2017 di Kabupaten Kudus ada 1 (satu) sengketa informasi antara pemohon informasi ( A.A. Hudono Sutirto, SH) dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (PPID Utama) selaku termohon yang menyangkut ketidakpuasan jawaban dari Atasan PPID atas permohonan informasi terkait nama pemilik tanah dalam buku C Nomor 110 Persil 6/S IV luas 1.360 m2.

1. **Kendala dalam Pelayanan Informasi**
2. Lamanya penyediaan Informasi dari PPID Pembantu .

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, penyediaan informasi sangat tergantung dari supply data dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. Hal ini sangat penting mengingat waktu yang diperlukan untuk menjawab permintaan pemohon informasi harus sesuai dengan ketentuan.

1. Terbatasnya SDM Pengelola Informasi.

Jumlah personil yang terbatas mengakibatkan kurang maksimalnya peran pengelola informasi dan dokumentasi. Disamping mengelola pelayanan informasi, personil pengelola informasi juga terbebani dengan tugas lain yang diberikan Pimpinan. Hal ini menyebabkan kompetensi pengelola informasi masih kurang.

1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat (pemohon informasi) tentang keterbukaan informasi publik.

Adanya keterbukaan informasi, masyarakat merasa bahwa mereka memiiki akses yang sangat luas dalam mendapatkan informasi sehingga menyebabkan keterbukaan yang kebablasan.

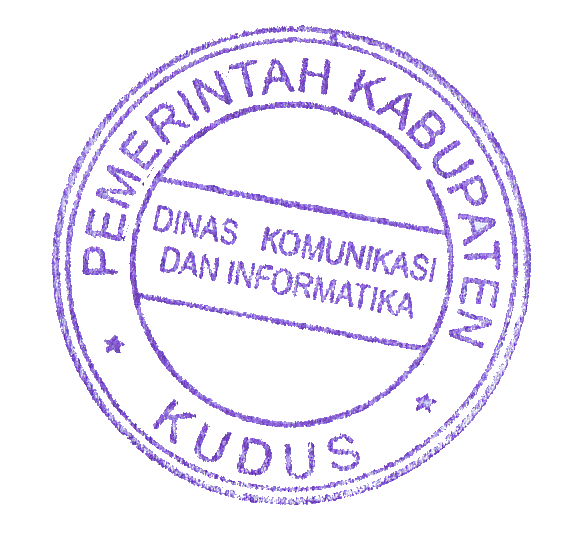
1. **Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut**
2. Peningkatan Kompetensi Pengelola Informasi

Pelaksanaan layanan informasi publik sering terkait dengan pelayanan informasi kepada pemohon informasi sehingga dibutuhkan SDM yang handal dan kompeten dalam melayani, maka pelatihan dan kursus dalam melayani permohonan informasi sangat dibutuhkan serta meningkatkan pembinaan kepada petugas pengelola informasi dan dokumentasi pada PPID Pembantu.

1. Peningkatan Koordinasi dengan Pihak Terkait dalam pengelolaan informasi Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam Pengelola Informasi dan Dokumentasi (seperti: Komisi Informasi Pusat, Kominfo, PPID Pembantu dan lain sebagainya).
2. Pengembangan Sistem Informasi PPID

Melakukan rekonstruksi website agar pengelolaan lebih optimal dan melakukan pengembangan sistem informasi PPID dengan melakukan interkoneksi dengan seluruh PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus .

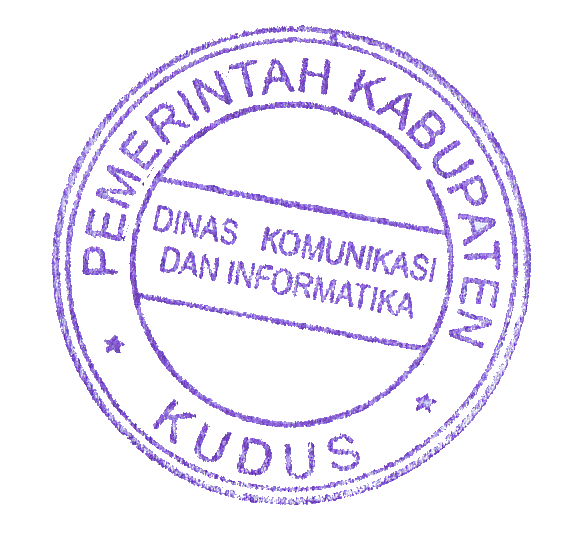
1. **Penutup**



Demikian Laporan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Kudus Kabupaten Tahun 2017 diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai berbagai capaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik di Pemerintah Kabupaten Kudus. Selanjutnya kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan akan segera terwujud agar target dan sasaran yang akan dicapai tercapai.

Mudah-mudahan Laporan ini dapat memenuhi kewajiban dan sekaligus dapat memberikan informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja bagi PPID Utama Kabupaten Kudus.





KEPALA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**Drs.KHOLID, MM**

Pembina Tingkat I

NIP. 19650130 199203 1 005

**DOKUMENTASI KEGIATAN**

**PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2017**

RAPAT-RAPAT PERMOHONAN INFORMASI DAN PENGUMPULAN DATA

DENGAN PPID PEMBANTU









**RAKOR PPID DENGAN PPID PEMBANTU**





**PENILAIAN PEMERINGKATAN BADAN PUBLIK TAHUN 2017**







